



Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dilihat dari Proporsi Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat 2018-2021

Kevinindo Jordan A¹, Enny Susilowati Mardjono²

^{1,2} Progdi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro

Diterima: Juni 2023; Direvisi: Agustus 2023; Dipublikasikan: Desember 2023

Abstract. Poverty is now starting to increase in number, and whatever happens in this situation will have an impact on social and economic problems. Even in West Java Province, Indonesia's poverty rate is still relatively high. The purpose of this study was to determine the factors that influence poverty in terms of the proportion of Human Resources (HR) in West Java Province 2018-2021 in West Java Province between 2018-2021 using population, human development index, and unemployment as independent variables. The method used in this research is multiple linear regression method. This type of research is descriptive quantitative with secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics of West Java Province. There were 108 samples consisting of 27 districts/cities with data collection for 4 years. The results of the study show that the three variables namely population, human development index, and unemployment have an impact and influence on poverty in west Java Province in 2018-2021

Keywords: population, human development index, unemploye, poverty

Abstrak. Kemiskinan kini mulai bertambah jumlahnya, dan apapun yang terjadi pada situasi ini akan berdampak pada masalah sosial dan ekonomi. Bahkan di Provinsi Jawa Barat, angka kemiskinan Indonesia masih relatif tinggi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor yang mempengaruhi kemiskinan dilihat dari proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Jawa Barat 2018-2021 di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2018-2021 menggunakan jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran sebagai variable independen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Terdapat 108 sampel yang terdiri dari 27 kabupaten/kota dengan pendataan selama 4 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran berdampak dan mempengaruhi pada kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2021

Kata Kunci: jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, pengangguran, kemiskinan

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah, kemiskinan telah menjadi masalah di setiap negara, tetapi menjadi sangat akut di negara-negara berkembang. Karena pemerintah belum menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang jitu dan tepat untuk masyarakat, maka masalah kemiskinan di Indonesia sendiri merupakan masalah sosial yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan penting untuk terus dikaji. Kemiskinan adalah masalah yang sangat rumit yang terkait dengan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi, yang berarti harus menyelesaikan semua penyebab kemiskinan. Menurut (Purnama, 2017) ada warga tertentu yang masih belum mampu mengatur kehidupannya secara manusiawi, yang berujung pada masalah kemiskinan ini.

Semua negara di dunia terutama negara berkembang masih berjuang dalam menangani kemiskinan negaranya. Bagi pemerintah, memerangi kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi masalah tersendiri bagi pembangunan di Indonesia. Indeks pembangunan manusia yang rendah, jumlah penduduk yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang menurun, tingkat inflasi, tingkat pendapatan, tingkat pengangguran, kesehatan, pendidikan, lokasi, dan banyak lagi karakteristik lainnya adalah beberapa penyebab kemiskinan.

Tingkat kemiskinan yang tinggi memiliki banyak efek negatif pada masyarakat, seperti peningkatan kejahatan, pengangguran, kerusuhan sosial, dan politik, serta kualitas hidup yang lebih buruk untuk generasi berikutnya. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus bekerja untuk meningkatkan pembangunan secara merata di berbagai daerah untuk mengakhiri kemiskinan di Indonesia, untuk mencapai kesejahteraan yang mencakup kesehatan, pendidikan, keamanan, dan keterampilan warga. Tetapi upaya ini tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Ada dua jenis kemiskinan yaitu, kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada standar yang tidak terpengaruh oleh waktu atau lokasi. Jika hasil pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, seseorang dianggap miskin absolut. Namun, kemiskinan relatif adalah kondisi masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak mampu mencapai seluruh lapisan masyarakat, yang menyebabkan ketidaksamaan dalam distribusi pendapatan.

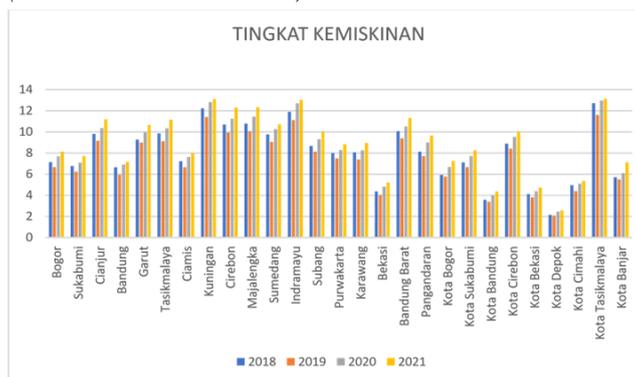
Terdapat dua jenis kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengarah pada standart yang konstan, tidak berpengaruh pada waktu, tempat dan negara. Seseorang dikatakan berada dalam kemiskinan absolut jika pendapatannya di bawah garis kemiskinan dan mereka tidak dapat membayar bahkan kebutuhan dasar mereka. Sementara itu, kemiskinan relative adalah dimana akibat program-program pembangunan yang belum mampu menjangkau semua bidang masyarakat sehingga mengakibatkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Didapati tiga karakteristik global kemiskinan di Indonesia, yaitu 1) Sebagian besar keluarga hampir berada di garis kemiskinan nasional, yang membuat sejumlah besar orang rentan terhadap kemiskinan; 2) pendapatan adalah indikator utama kemiskinan di Indonesia, bukan garis kemiskinan yang sebenarnya; dan 3) karakteristik dasar kemiskinan di Indonesia adalah wilayah negara yang luas dan perbedaan wilayah yang beragam (Ristika et al., 2021). Selain kemiskinan, masalah lain yang ada di dekatnya adalah pengangguran.

Pembangunan ekonomi suatu negara juga dipengaruhi oleh meningkatnya tingkat pengangguran. Menurut (Himo et al., 2022) seseorang yang menganggur adalah orang yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum melakukannya. Secara khusus, tingkat pengangguran yang lebih tinggi akan memiliki efek negatif karena membuat beberapa rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi mereka karena kurangnya uang dan pekerjaan. Tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor yang menentukan seberapa makmur suatu bangsa. Tingkat kemakmuran yang sudah dicapai akan menurun sebagai akibat dari pengangguran, yang juga akan berpengaruh pada penurunan pendapatan masyarakat. Faktor-faktor yang diketahui berkontribusi termasuk tingkat pengangguran yang tinggi, masalah ledakan populasi, distribusi uang yang tidak merata, dan sejumlah masalah lain. Rendahnya tingkat kehidupan bangsa kita adalah penyebab utama.

Tabel 1. 1 Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Jawa Barat 2018-2021

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Barat diolah 2023



Menurut tabel di atas, tingkat kemiskinan relatif rendah di bawah angka 10% (hard core), khususnya di Provinsi Jawa Barat. Ini adalah prestasi pemerintah daerah dalam memerangi kemiskinan yang patut dipuji. Namun, sejumlah kabupaten dan kota masih memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional Provinsi Jawa Barat. Kota Depok, Bandung, Bekasi, Cimahi, Banjar, dan Bogor adalah daerah yang berhasil mencapai angka di bawah rata-rata. Untuk menggunakannya sebagai panduan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, diperlukan untuk mencari variabel yang dapat berkontribusi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat (BPS, 2019).

Pada tahun 2018 dan 2021, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat terus meningkat. Namun dibandingkan dengan 2018, tingkat kemiskinan jauh turun menjadi 0,54 persen pada 2019. Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat naik menjadi 7,45 persen pada 2018, turun menjadi 6,91 persen pada 2019, dan kemudian meningkat tajam pada 2020 dan 2021, naik 0,97 persen menjadi 7,88 persen pada 2020 dan 0,52 persen menjadi 8,40 persen pada 2021. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan guncangan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan penduduk di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kemiskinan di Jawa Barat. Mengingat Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan tingkat kemiskinan di sana meningkat signifikan pada tahun 2020 dan 2021, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dan ingin menentukan apakah sampel uji yang mereka buat merupakan indikator lain dari meningkatnya kemiskinan selain COVID 19.

Selain itu, masalah kemiskinan yang masih berhubungan dengan jumlah penduduk adalah lapangan pekerjaan yang belum terpenuhi untuk mengakomodasi angkatan kerja yang telah terbentuk, sehingga mengarah pada terciptanya pengangguran, yang pada gilirannya menyebabkan kemiskinan berkembang. Standar hidup dianggap sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan selain pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran. Indeks pembangunan manusia (IPM) memberikan refleksi dari standar hidup manusia. Dalam upaya untuk menyamakan pendapatan di suatu negara atau wilayah, isu-isu seperti jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran dapat terjadi, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Tentu saja, ini mungkin berpengaruh pada bagaimana kemiskinan berkembang.

Dalam mengukur tingkat kemiskinan, BPS menggunakan Batasan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need approach) yang kemudian diukur berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun bukan makanan. Selama kurun waktu Maret 2016-Maret 2021, garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Garis kemiskinan meningkat dari Rp410.988 per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp427.402 per kapita per bulan pada Maret 2021 (naik 3,99 persen).

Selama enam tahun terakhir Kota Depok memiliki garis kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. Pada Maret 2021 garis kemiskinan Kota Depok sebesar Rp705.084 per kapita per bulan. Sementara itu pada kurun waktu yang sama, Kabupaten Garut mempunyai garis kemiskinan yang terendah. Pada Maret 2021 garis kemiskinan Kabupaten Garut sebesar Rp320.050 per kapita per bulan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Menurut (Hastin & Siswadhi, 2021) Kemiskinan adalah keadaan di mana beberapa orang harus hidup di bawah kebutuhan dasar karena mereka tidak dapat mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemerintah Indonesia masih harus melakukan banyak hal untuk mengurangi kemiskinan. Banyak orang di Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan menghalangi kemajuan. Untuk mengukur kemiskinan, tiga faktor digunakan, yaitu:

1. Angka Kemiskinan

Proporsi dari individu yang pengeluaran per-kapita mereka berada dibawah garis kemiskinan

2. Kedalaman Kemiskinan

Pengeluaran per-kapita adalah perbedaan rata-rata antara garis kemiskinan dan penduduk miskin. Semakin tinggi angka kemiskinan, semakin miskin masyarakat miskin, karena pengeluaran per kapita mereka lebih jauh dari garis kemiskinan.

3. Keparahan Kemiskinan

Perbedaan kuadrat rata-rata antara garis kemiskinan dan pengeluaran per kapita penduduk miskin. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin miskin penduduk termiskin, karena bobot yang diterapkan dengan mengkuadratkan selisih pengeluaran per kapita.

Tidak selalu penurunan angka kemiskinan disertai dengan penurunan kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah penurunan angka kemiskinan disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk, juga diperlukan untuk memperhatikan pergerakan kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan dari waktu ke waktu. (Sepakat.bappenas.go.id)

Jumlah Penduduk

Besarnya jumlah penduduk merupakan salah satu hal yang dianggap berdampak pada kemiskinan. Menurut teori Malthus, pertumbuhan penduduk harus terus berlanjut untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Namun, dikhawatirkan bahwa pertumbuhan populasi dapat berdampak buruk pada masalah kemiskinan.

Menurut hasil proyeksi penduduk sementara untuk tahun 2020 hingga 2023, Provinsi Jawa Barat akan memiliki populasi 48.782.400, menjadikannya provinsi terpadat di Indonesia (peringkat 1). Dari segi jumlah penduduk, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten merupakan lima provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi secara nasional. Kalimantan Utara yang hanya memiliki 713,6 ribu penduduk merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terendah (BPS Jawa Barat 2021).

Secara umum, populasi negara berkembang telah meningkat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena jumlah penduduk yang tinggi merupakan pasar potensial yang dapat dijadikan sebagai sumber permintaan untuk berbagai komoditas dan jasa, penduduk menjadi katalisator untuk pembangunan dan menciptakan skala ekonomi dalam produksi. Tujuan dari skala ekonomi ini adalah untuk mempelajari komponen yang dominan yang memengaruhi kemiskinan dari sudut pandang hasil yang menguntungkan bagi semua pihak, yaitu penurunan biaya produksi dan penciptaan sumber pasokan atau tenaga kerja yang cukup.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia adalah indikator strategis general yang digunakan untuk menilai upaya program dan kinerja pembangunan di suatu wilayah. Dalam konteks ini, IPM dianggap sebagai representasi sebuah hasil proyek pembangunan yang telah di eksekusi selama berbagai abad yang lalu. Dengan cara yang sama, jumlah IPM pada awal dan akhir periode dapat digunakan untuk mengukur dan menunjukkan kemajuan program selama periode tersebut.

Tenaga kerja yang lebih berkualitas dan lebih mampu akan lebih dihargai dari pada yang kurang berkualitas. Menurut UNDP (United Nations Development Programme), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibuat untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting dari kualitas hidup. IPM dikembangkan melalui pendekatan tiga dimensi utama, yang mencakup:

1. *A long and healthy life*, umur panjang dan hidup sehat
2. *Knowledge*, pengetahuan
3. *Decent standard of living*, standar hidup layak

Pengangguran

Seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang atau menerima tunjangan dikatakan menganggur. Ketidaksesuaian yang menakutkan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja juga berkontribusi pada peningkatan tindak pidana yang mengganggu ekonomi dan keamanan Indonesia. Menurut (BPS Jawa Barat, 2021) perkiraan jumlah penduduk usia kerja di Jawa Barat pada Agustus 2021 diperkirakan sekitar 38,09 juta orang berdasarkan hasil awal Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 penduduk proyeksi. Secara komparatif, ada 1,55 pesen lebih banyak orang (0,58 juta) dari pada pada bulan Agustus tahun sebelumnya (37,51 juta orang). Sekitar 24,74 juta adalah jumlah Angkatan kerja. Pada Agustus 2021, jumlah penduduk yang bekerja (angkatan kerja) di Jawa Barat meningkat sekitar 0,53 juta (2,19%) dibandingkan Agustus 2020 (24,21 juta orang). Akibatnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) untuk Agustus 2021 diproyeksikan menjadi 64,95 persen, yang merupakan peningkatan 0,42 persen di

bandingkan keadaan Agustus 2020 (64,53 persen).

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Pengertian populasi menurut Sugiyono, (2018) adalah area generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengangguran di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018-2021. Data akan didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat.

Menurut Sugiyono, (2018) Sampel harus benar-benar menggambarkan atau mewakili populasi yang diteliti karena sampel termasuk dalam jumlah dan karakteristik populasi. Menurut Sugiyono, (2018) Semua anggota populasi diambil sebagai sampel dalam metode sampling jenuh. Hal ini sering dilakukan jika jumlah populasi relatif sedikit. Peneliti akan mengambil sampel sebanyak 108 data. Data tersebut dari 27 bulan x 4 tahun = 108 data. Pengambilan sampel melalui Website bps.go.id Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi, yang menawarkan informasi tentang metode pengumpulan data dan pengolahan dokumen. BPS dapat diakses secara online di www.bps.go.id untuk mendapatkan data seperti jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran, dan kemiskinan tahun 2018-2021.

Metode Analisis

Metode analisis data dilakukan oleh peneliti yaitu analisis regresi linier berganda yang dilakukan pengujian asumsi klasik dan uji hipotesis. Selanjutnya, program spss digunakan untuk mengolah data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Tes Normal One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,70196779
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,083
	Negative	-,051
Test Statistic		,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		,067 ^c

Hasil uji normalitas terhadap 108 variabel menunjukkan bahwa memenuhi asumsi normalitas model regresi. Nilai yang diperoleh yaitu $0,067 > 0,05$ yang membuktikan bahwa data yang diproses peneliti normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Std. Error	Coefficients Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	39,343	2,547		15,444	,000		
	Jumlah Penduduk	-,331	,068	-,304	-4,882	,000	,935	1,069
	Indeks Pembangunan Manusia	-,452	,036	-,770	-12,375	,000	,940	1,064
	Pengangguran	,271	,078	,223	3,478	,001	,882	1,134

Uji multikolinearitas yang dilakukan terhadap 108 sampel tidak menunjukkan adanya multikolinearitas. Dengan nilai toleransi lebih dari 0,01 dan nilai VIF kurang dari 10 disimpulkan data penelitian tidak menunjukkan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3 Hasil Heteroskedastisitas (Uji Park) Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	2,276	3,110		,732	,466	
	Jumlah Penduduk	-,121	,083		-,146	-1,466	,146
	Indeks Pembangunan Manusia	-,019	,045		-,042	-,419	,676
	Pengangguran	-,071	,095		-,076	-,743	,459

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam data, karena variabel Jumlah Penduduk memiliki nilai signifikansi 0,466 > 0,05. Variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki signifikansi sebesar 0,146 > 0,05. Variabel Pengangguran memiliki nilai signifikansi 0,459 > 0,05.

Uji Autokorelasi

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,789 ^a	,622	,611	1,72634	2,009

Uji autokorelasi dengan tiga variabel independen menghasilkan hasil *Durbin-Watson* sebesar 2,009, yang menunjukkan bahwa data yang diuji tidak menunjukkan autokorelasi.

Uji Koefisien Determinasi R²

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi R² Model Summary^b

R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
,622	,611	1,72634	2,009

Hasil dari uji koefisien determinasi (R^2) bernilai 0,611 memperlihatkan variabel jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran dapat menjelaskan faktor dependennya yaitu kemiskinan 61,1 % selebihnya sebesar 38,9% dapat diuraikan dengan faktor kain diluar regresi ini.

Uji Hipotesis

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 6 Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	509,770	3	169,923	57,016	,000 ^b
	Residual	309,946	104	2,980		
	Total	819,716	107			

Hipotesis Uji F menghasilkan nilai signifikansi 0,00, yang berarti bahwa nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran mempengaruhi kemiskinan.

Uji T (Uji Partial)

Tabel 7 Hasil Uji T Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	39,343	2,547		15,444	,000		
	Jumlah Penduduk	-,331	,068	-,304	-4,882	,000	,935	1,069
	Indeks Pembangunan Manusia	-,452	,036	-,770	-12,375	,000	,940	1,064
	Pengangguran	,271	,078	,223	3,478	,001	,882	1,134

Pengaruh Jumlah Penduduk (X_1) terhadap Kemiskinan (Y)

Hasil dari pengujian analisis data menunjukkan secara parsial bahwa variabel jumlah penduduk memengaruhi kemiskinan. Hasil dapat dilihat dari nilai tingkat signifikansi Jumlah Penduduk 0,00, yang berarti kurang dari 0,05 dan nilai t hitung -4,882 yang menunjukkan bahwa hipotesis bahwa Jumlah Penduduk memengaruhi kemiskinan diterima. Penelitian yang dilakukan oleh Ristika et al., (2021) variabel Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Jawa Timur menemukan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Namun, penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Asiyah, (2022) dan menunjukkan bahwa penelitian yang menggunakan variabel jumlah penduduk memiliki dampak.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (X_2) terhadap Kemiskinan (Y)

Hasil pengujian analisis data menunjukkan secara parsial bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia memengaruhi tingkat kemiskinan. Ini ditunjukkan oleh tingkat signifikansi Indeks Pembangunan Manusia 0,00 yang berarti kurang dari 0,05 dan t hitung

12,375 sehingga variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan diterima. Jika indeks pembangunan manusia turun, produktivitas kinerja penduduk turun, yang dapat menyebabkan kemiskinan tinggi di daerah tertentu. Menurut penelitian Azizah & Asiyah, (2022) menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak memengaruhi tingkat kemiskinan. Namun, penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Ristika et al., (2021), yang menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dapat memengaruhi tingkat kemiskinan.

Pengaruh Pengangguran (X_3) terhadap Kemiskinan (Y)

Hasil dari pengujian analisis data menunjukkan secara parsial bahwa variabel pengangguran memengaruhi tingkat kemiskinan. Hasilnya dapat dilihat dari angka signifikansi Pengangguran sebesar 0,001 yang berarti kurang dari 0,05 dan t hitung 3,478 yang menunjukkan bahwa hipotesis pengangguran berdampak pada kemiskinan. Pengangguran adalah faktor yang saling berpengaruh terhadap kemiskinan, karena tingkat pengangguran yang tinggi berkorelasi dengan tingkat kemiskinan di daerah tertentu. Menurut studi yang dilakukan oleh Ardian et al., (2021) tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat kemiskinan di Aceh dari tahun 2009 hingga 2015. Namun, penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi & Puspitasari, (2020) yang menemukan bahwa variabel pengangguran memengaruhi kemiskinan di Provinsi Aceh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dapat dibuat:

1. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2021, yang dihitung dengan uji t dengan sig $0,00 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa jika jumlah penduduk meningkat, kemiskinan akan meningkat.
2. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2021. Hal ini diperoleh dari uji t yang menunjukkan bahwa sig sebesar $0,000 < 0,05$.
3. Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2021. Ini didapatkan dari uji t, sig sebesar $0,001 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan akan meningkat seiring dengan peningkatan pengangguran.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentunya tidak lepas dari keterbatasan berbagai aspek, yaitu:

1. Penelitian menggunakan tahun penelitian hanya 4 tahun.
2. Hanya menggunakan 3 variabel dalam penelitian ini yaitu jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengangguran. Ada lebih banyak variabel yang berkontribusi pada kemiskinan.

Saran

Peneliti dapat menyarankan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap, menambah, dan melengkapi semua elemen yang dapat mempengaruhi angka kemiskinan, terutama di Indonesia, dengan menggunakan lebih banyak variabel dan tahun yang diperpanjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, R., Yulmardi, Y., & Bhakti, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(1), 23–34. <https://doi.org/10.53867/jea.v1i1.3>
- Azizah, A. N., & Asiyah, B. N. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Sibatik Journal*, 1(12), 2697–2718. <https://publish.ojsindonesia.com/index.php/SIBATIK>
- Baihaqi, A. B., & Puspitasari, P. (2020). Analisis Dampak Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Zakat Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Journal Publicuho*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12272>
- BPS. (2019). Kemiskinan Kabupaten / Kota Di Jawa Barat. BPS Jawa Barat. (2021). Keadaan Angkatan Kerja 2021.
- BPS Jawa Barat 2021. (n.d.). Indikator Strategis Provinsi Jawa Barat 2021.
- BPS Jawa Barat 2021. (2021). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat. 115.
- Budhijana, R. B. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Index Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2000-2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 5(1), 36. <https://doi.org/10.35384/jemp.v5i1.170>
- Dharmmayukti, B., Rotinsulu, T. O., & Niode, A. O. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado 2004-2019. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(05), 98–105.
- Himo, J. T., Rotinsulu, D. C., & Tolosang, K. D. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 4 Kabupaten di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(4), 124–135. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/42238/37378>
- Purnama. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(1), 62–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i1.1181>